



MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI  
TAHUN ANGGARAN 2018

**PENGUMUMAN**

NOMOR : 01/Pansel-CPNS/MA/09/2018  
SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI  
TAHUN ANGGARAN 2018

Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2018 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia, melalui penerimaan CPNS dengan ketentuan sebagai berikut:

I. NAMA JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH FORMASI  
A. FORMASI UMUM

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI
1	2	3	4
1	Analisis Perkara Peradilan	S-1 bidang Hukum	287
2	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	S-1 Administrasi ( Negara / Publik ) / Psikologi / Ekonomi (Manajemen / Akutansi / Pembangunan ) / Ilmu Pemerintahan / Ilmu Hukum	339
3	Pengelola Sistem dan Jaringan	D-III Teknik Informatika / Manajemen Teknik Informatika / Telekomunikasi / Komputer	177
4	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 Ilmu Komputer / Teknik Informatika / Sistem Informasi / Teknik Komputer	44
5	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	S-1 / D-IV Ilmu Kepegawaian / Ilmu Ekonomi Manajemen / Ilmu Politik / Ilmu Administrasi Negara / Ilmu Administrasi Publik / Ilmu Hukum / Ilmu Pemerintahan / Ilmu Sosial Politik / Ilmu Kebijakan Publik / Ilmu Ekonomi Manajemen SDM dan Ilmu Sosiologi	90
Jumlah			937

**B. FORMASI CUMLAUDE**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI
1	2	3	4
1	Analisis Perkara Peradilan	S-1 bidang Hukum	28
2	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	S-1 Administrasi ( Negara / Publik ) / Psikologi / Ekonomi (Manajemen / Akutansi / Pembangunan ) / Ilmu Pemerintahan / Ilmu Hukum	39
3	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 Ilmu Komputer / Teknik Informatika / Sistem Informasi / Teknik Komputer	6
4	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	S-1 / D-IV Ilmu Kepegawaian / Ilmu Ekonomi Manajemen / Ilmu Politik / Ilmu Administrasi Negara / Ilmu Administrasi Publik / Ilmu Hukum / Ilmu Pemerintahan / Ilmu Sosial Politik / Ilmu Kebijakan Publik / Ilmu Ekonomi Manajemen SDM dan Ilmu Sosiologi	9
Jumlah			82

**C. FORMASI DISABILITAS**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI
1	2	3	4
1	Analisis Perkara Peradilan	S-1 bidang Hukum	7
2	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	S-1 Administrasi ( Negara / Publik ) / Psikologi / Ekonomi (Manajemen / Akutansi / Pembangunan ) / Ilmu Pemerintahan / Ilmu Hukum	8
3	Pengelola Sistem dan Jaringan	D-III Teknik Informatika / Manajemen Teknik Informatika / Telekomunikasi / Komputer	4
4	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 Ilmu Komputer / Teknik Informatika / Sistem Informasi / Teknik Komputer	2
5	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	S-1 / D-IV Ilmu Kepegawaian / Ilmu Ekonomi Manajemen / Ilmu Politik / Ilmu Administrasi Negara / Ilmu Administrasi Publik / Ilmu Hukum / Ilmu Pemerintahan / Ilmu Sosial Politik / Ilmu Kebijakan Publik / Ilmu Ekonomi Manajemen SDM dan Ilmu Sosiologi	1
Jumlah			22

**D. FORMASI PAPUA DAN PAPUA BARAT**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI
1	2	3	4
1	Analisis Perkara Peradilan	S-1 bidang Hukum	3
2	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	S-1 Administrasi ( Negara / Publik ) / Psikologi / Ekonomi (Manajemen / Akutansi / Pembangunan ) / Ilmu Pemerintahan / Ilmu Hukum	4
3	Pengelola Sistem dan Jaringan	D-III Teknik Informatika / Manajemen Teknik Informatika / Telekomunikasi / Komputer	3
4	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 Ilmu Komputer / Teknik Informatika / Sistem Informasi / Teknik Komputer	1
Jumlah			11

## II. KETENTUAN UMUM

- a. Proses Seleksi Penerimaan CPNS Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2018 terbuka untuk semua Warga Negara Indonesia.
- b. Bersedia mengikuti seluruh proses tahapan seleksi.
- c. Seluruh tahapan proses seleksi tidak dipungut biaya.
- d. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. **Setiap pemberitahuan terkait proses Seleksi Penerimaan CPNS Mahkamah Agung akan diumumkan hanya melalui portal resmi pada website <https://www.mahkamahagung.go.id>.**

## III. PERSYARATAN

### III.1 Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Sehat jasmani dan rohani.
- c. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri.
- e. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota TNI/Polri.
- f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, Lulusan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam BAN PT, pada saat ijazah tersebut dikeluarkan, jika akreditasi tidak tertulis di dalam ijazah, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari BAN PT atau surat pernyataan dari Fakultas.
- g. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) skala 4,00 (empat koma nol), dibuktikan dengan Fotokopi ijazah dan transkrip nilai, dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang. (Sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 11 tahun 2002)
- h. Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Agama dan konversi nilai yang setara dengan poin g.
- i. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran di SSCN BKN.

### III.2 Persyaratan Khusus

- a. Bagi Pelamar Cumlaude
  1. Pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi dalam negeri dengan predikat DENGAN PUJIAN (*cumlaude*) dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A / Unggul dan Program Studi terakreditasi A / Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) pada saat ijazah tersebut dikeluarkan dan dibuktikan dengan Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai, dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 11 tahun 2002). Jika akreditasi tidak tertulis di dalam ijazah, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari BAN PT atau surat pernyataan dari Fakultas.
  2. Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara Cumlaude dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Agama.

- b. Bagi Pelamar dari penyandang disabilitas
  1. Pelamar disabilitas fisik-tuna daksa pada kaki atau salah satu tangan, dibuktikan dengan surat keterangan disabilitas fisik dari Rumah Sakit Umum Pemerintah;
  2. Panitia seleksi melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis disabilitas yang disandang.
  3. Verifikasi dilakukan di Kantor Pengadilan terdekat dari lokasi pelamar dengan membawa kartu registrasi online dan surat keterangan disabilitas fisik dari Rumah Sakit Umum Pemerintah.
  4. Untuk mengetahui alamat Pengadilan terdekat, dapat mengakses website <https://www.mahkamahagung.go.id>
- c. Bagi Pelamar Papua dan Papua Barat  
Pelamar harus merupakan keturunan Papua / Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak atau ibu) asli Papua / Papua Barat, dibuktikan dengan akta kelahiran dan / atau surat keterangan lahir yang bersangkutan diperkuat dengan surat keterangan kepala desa atau kepala suku.

#### IV. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAKSANAAN SELEKSI

- a. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan;
- b. Melakukan registrasi online melalui situs <https://sscn.bkn.go.id> mulai hari Rabu tanggal 26 September 2018 dan ditutup pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 (harap mencatat dan menyimpan dengan baik *user name* dan *password* pada saat registrasi) dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen dari masing-masing dokumen yang dipersyaratkan:
  - 1) Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-elektronik yang masih berlaku, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - 2) Fotocopy Ijazah yang **dilegalisir** oleh pejabat yang berwenang (sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002) dan melampirkan fotokopi surat keterangan akreditasi dari BAN PT atau Surat Pernyataan dari Fakultas apabila Akreditasi tidak tercantum dalam ijazah;
  - 3) Fotocopy Transkrip Nilai yang **dilegalisir** oleh pejabat yang berwenang (sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002);
  - 4) Pas foto terbaru (latar belakang warna merah);
  - 5) Surat Lamaran yang ditujukan Kepada Sekretaris Mahkamah Agung dengan dibubuhi meterai Rp.6000,- ditulis tangan dengan tinta hitam pada kertas folio bergaris dengan mencantumkan jabatan yang dilamar;
  - 6) Dokumen lain :
    - a. Bagi pelamar disabilitas fisik: Surat Keterangan Disabilitas Fisik dari Rumah Sakit Umum Pemerintah.
    - b. Bagi Pelamar Papua dan Papua Barat: Akta Kelahiran dan / atau Surat Keterangan Lahir yang bersangkutan diperkuat dengan surat keterangan kepala desa atau kepala suku.
  - 7) Apabila dokumen yang diunggah tidak lengkap / tidak sesuai yang dipersyaratkan / tidak jelas maka dinyatakan **tidak lulus seleksi administrasi**;
  - 8) Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang diunggah tidak benar, maka kelulusan yang bersangkutan dibatalkan.
- c. Ujian CPNS Tahun Anggaran 2018 terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan Sistem *Computer Assisted Test* (CAT).

d. Ujian SKD dilaksanakan di 30 (tiga puluh) lokasi sebagai berikut:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. DKI Jakarta - Jakarta            | 16. Kalimantan Tengah - Palangkaraya           |
| 2. D I Yogyakarta - Yogyakarta      | 17. Sulawesi Tenggara - Kendari                |
| 3. Jawa Timur - Surabaya            | 18. Sulawesi Tengah - Palu                     |
| 4. Jawa Barat - Bandung             | 19. Gorontalo - Gorontalo                      |
| 5. Sulawesi Selatan - Makassar      | 20. Sumatera Barat - Padang                    |
| 6. Sumatera Utara - Medan           | 21. Jambi - Jambi                              |
| 7. Sumatera Selatan - Palembang     | 22. Bengkulu - Bengkulu                        |
| 8. Kalimantan Selatan - Banjarmasin | 23. Banten - Serang                            |
| 9. Papua - Jayapura                 | 24. Jawa Tengah - Semarang                     |
| 10. Bali - Denpasar                 | 25. Kalimantan Barat - Pontianak               |
| 11. Sulawesi Utara - Manado         | 26. Lampung - Bandar Lampung                   |
| 12. Riau - Pekanbaru                | 27. Kepulauan Bangka Belitung - Pangkal Pinang |
| 13. Aceh - Banda Aceh               | 28. Nusa Tenggara Timur - Kupang               |
| 14. Maluku - Ambon                  | 29. Kalimantan Timur - Samarinda               |
| 15. Nusa Tenggara Barat - Mataram   | 30. Maluku Utara - Ternate                     |

e. Peserta memilih salah satu tempat pelaksanaan ujian sebagaimana tersebut di atas;

f. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD selanjutnya mengikuti tahap ujian SKB yang dilaksanakan di 10 (sepuluh) lokasi dan akan ditentukan lebih lanjut oleh panitia seleksi CPNS.

g. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi harus mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui situs <https://sscn.bkn.go.id>. (kartu ujian dicetak pada *printer* berwarna).

## V. TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI

### V.1 TAHAPAN SELEKSI

Seleksi penerimaan CPNS Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Administrasi.
- b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT);
  - 1) Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi berhak untuk mengikuti SKD sesuai dengan lokasi tes yang dipilih melalui <https://sscn.bkn.go.id>.
  - 2) Peserta yang lulus SKD, paling banyak 3 (tiga) kali jumlah formasi berhak mengikuti SKB.
- c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT).
- d. Bobot penilaian SKD 40% dan SKB 60%, nilai SKD dan SKB diintegrasikan berdasarkan Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2018;
- e. Pengumuman hasil Seleksi Akhir:
  - 1) Hasil seleksi akhir merupakan nilai kumulatif dari nilai SKD dan SKB;
  - 2) Peserta dengan ranking tertinggi sesuai jumlah formasi jabatan dinyatakan lulus seleksi CPNS dan ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional yang akan diumumkan pada website <https://www.mahkamahagung.go.id>.

## V.2 JADWAL SELEKSI \*)

NO	TANGGAL	KEGIATAN
1	19 September 2018 s.d. 10 Oktober 2018	Pengumuman Pengadaan CPNS Tahun 2018
2	26 September 2018 s.d. 10 Oktober 2018	Pendaftaran secara Online
3	26 September 2018 s.d. 10 Oktober 2018	Verifikasi Pelamar Disabilitas
4	26 September 2018 s.d. 17 Oktober 2018	Seleksi Administrasi Pelamar
5	18 Oktober 2018	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan CAT BKN
6	24 Oktober 2018 s.d. 2 November 2018	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan CAT BKN
7	8 November 2018	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
8	14 s.d. 17 November 2018	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT BKN
9	26 November 2018	Pengumuman Kelulusan Akhir

\*) Jika terdapat perubahan jadwal akan diberitahukan melalui web site Mahkamah Agung RI <https://www.mahkamahagung.go.id>

## VI. PERSYARATAN PEMBERKASAN BAGI YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI CPNS

1. Pelaksanaan pemberkasan dilakukan mulai tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 (cap pos).
2. Syarat Pemberkasan:
  - a) Fotokopi kartu tanda peserta ujian;
  - b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan KTP elektronik sementara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang masih berlaku;
  - c) Mengisi Daftar Riwayat Hidup ditulis tangan dengan huruf kapital, beserta surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI bermeterai Rp.6000,- sesuai dengan format yang telah disediakan dan ditempel foto;
  - d) Fotokopi ijazah dan transkrip nilai dari Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah sesuai syarat jabatan yang dilamar, dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang. (Sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 11 tahun 2002)
  - e) Asli dan Fotokopi legalisir surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit Umum Pemerintah yang masih berlaku;
  - f) Asli dan Fotokopi legalisir surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPPZA dari Rumah Sakit Umum Pemerintah yang masih berlaku;
  - g) Asli dan Fotokopi legalisir Surat Tanda Pencari Kerja (Kartu Kuning) dari Kementerian Ketenagakerjaan yang masih berlaku;
  - h) Asli dan Fotokopi legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
  - i) Pas foto terakhir ukuran 3 x 4 sebanyak 8 lembar dan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar latar belakang warna merah (ditulis nama dan formasi jabatan).

3. Tata Cara Penyusunan Berkas:

A. Pada MAP pertama terdiri dari:

- a) Fotokopi kartu tanda peserta ujian;
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan KTP elektronik sementara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang masih berlaku
- c) Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 8 lembar dan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar latar belakang merah (ditulis nama dan formasi jabatan);
- d) Fotokopi ijazah dan transkrip nilai sesuai syarat jabatan yang dilamar dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang. (Sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 11 tahun 2002) sebanyak 1 rangkap;
- e) Asli Daftar Riwayat Hidup ditulis tangan dengan huruf kapital, beserta Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI sebanyak 1 rangkap;
- f) Asli surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit Umum Pemerintah yang masih berlaku sebanyak 1 rangkap;
- g) Asli surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPPZA dari Rumah Sakit Umum Pemerintah yang masih berlaku sebanyak 1 rangkap;
- h) Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku sebanyak 1 rangkap;
- i) Asli Surat Tanda Pencari Kerja (Kartu Kuning) dari Kementerian Ketenagakerjaan yang masih berlaku sebanyak 1 rangkap;
- j) MAP ditulis identitas berupa nomor peserta, nama, formasi jabatan, tempat lahir (tempat lahir harus setingkat Kabupaten/Kota), dan alamat rumah sesuai identitas (KTP) serta Kode Pos dengan mencantumkan nomor telepon, email dan nomor handphone yang mudah dihubungi.

B. Pada MAP kedua terdiri dari:

- a) Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai dari Sekolah Dasar sampai dengan ijazah sesuai syarat jabatan yang dilamar dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang. (Sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 11 tahun 2002) sebanyak 1 rangkap;
- b) Daftar Riwayat Hidup ditulis tangan dengan huruf kapital, beserta Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI sebanyak 1 rangkap;
- c) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit Umum Pemerintah yang masih berlaku sebanyak 1 rangkap;
- d) Fotokopi legalisir surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPPZA dari Rumah Sakit Umum Pemerintah yang masih berlaku sebanyak 1 rangkap;
- e) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku sebanyak 1 rangkap;
- f) Fotokopi legalisir Surat Tanda Pencari Kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan yang masih berlaku sebanyak 1 rangkap;
- g) MAP ditulis identitas berupa nomor peserta, nama, formasi jabatan, tempat lahir (tempat lahir harus setingkat Kabupaten/Kota), dan alamat rumah sesuai identitas (KTP) serta Kode Pos dengan mencantumkan nomor telepon, email dan nomor handphone yang mudah dihubungi.

C. WARNA MAP:

1. Untuk Analis Perkara Peradilan map berwarna merah;
  2. Untuk Analis SDM Aparatur map berwarna hijau;
  3. Untuk Pengelola Sistem dan Jaringan map berwarna kuning;
  4. Untuk Pranata Komputer Ahli Pertama map berwarna coklat;
  5. Untuk Analis Kepegawaian Ahli tingkat Pertama map berwarna biru.
4. Berkas dimaksud ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI c.q. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dikirim melalui pos dengan PO BOX 2700 Jakarta 10027 selambat-lambatnya diterima pada tanggal 15 Desember 2018 (cap pos).

VII. RENCANA PENEMPATAN

Pelamar CPNS Mahkamah Agung RI yang dinyatakan lulus ujian seleksi penerimaan CPNS akan ditempatkan di seluruh satuan kerja Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

VIII. LAIN-LAIN

1. Keputusan kelulusan pada setiap tahapan seleksi tidak dapat diganggu gugat.
2. Biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti kegiatan Penerimaan CPNS tidak ditanggung Mahkamah Agung.
3. Panitia Penerimaan CPNS Mahkamah Agung Tahun 2018, tidak memungut biaya.
4. Pelamar dilarang melayani tawaran / janji untuk penerimaan sebagai CPNS Mahkamah Agung RI dari pihak manapun
5. Pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian seleksi namun sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak melengkapi berkas persyaratan, maka dianggap mengundurkan diri.
6. Pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian seleksi tetapi mengundurkan diri, maka **diwajibkan membuat Surat Pernyataan Mengundurkan diri bermeterai Rp. 6000,-** paling lambat sudah diterima Biro Kepegawaian Mahkamah Agung pada tanggal 15 Desember 2018.
7. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Mahkamah Agung Tahun 2018 dapat menghubungi *helpdesk* SSCN BKN, atau *helpdesk* Mahkamah Agung pada *Call Center* telepon dan WhatsApp: 0821-2321-4548, Twitter: @CMahkamahagung, Facebook: <https://www.facebook.com/cpnsmahkamah.agung.3> email: [rekrutmen.cpns@mahkamahagung.go.id](mailto:rekrutmen.cpns@mahkamahagung.go.id) pada hari kerja Senin s.d. Jumat Pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB.
8. Segala bentuk pengaduan terhadap tindakan penyimpangan pada pelaksanaan penerimaan CPNS Mahkamah Agung dapat disampaikan melalui *Whistleblowing System* Mahkamah Agung RI., dengan alamat <https://siwas.mahkamahagung.go.id>.

Jakarta, 19 September 2018  
Sekretaris Mahkamah Agung RI

selaku  
Ketua Panitia,  
  
A.S. PUDJOHARSOYO